



Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP PGRI 6 Malang

Magdalena Isus¹, Didik Iswahyudi², Romahdon³

^{1,2,3}Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

E-mail: magdalenaigus200@gmail.com, didik@unikama.ac.id, romadhon@unikama.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-04 Keywords: <i>Values; Anti-Corruption; Civic Education Learning.</i>	This study aims to examine the implementation of anti-corruption values through Civics Education (PPKn) learning at SMP PGRI 6 Malang. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of anti-corruption values has been carried out well in several aspects, although some aspects have not been fully implemented. Supporting factors in this implementation include the influential role of teachers, teachers' understanding of corruption, and the role of parents as the first educators in shaping students' attitudes and character. Meanwhile, the inhibiting factors include the lack of students' understanding of anti-corruption education and an unsupportive social environment.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-04 Kata kunci: <i>Nilai-Nilai; Anti Korupsi; Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran PPKn di SMP PGRI 6 Malang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai anti korupsi sudah terlaksana dengan baik pada beberapa aspek, meskipun beberapa aspek lainnya belum sepenuhnya terimplementasi. Faktor pendukung dalam implementasi ini meliputi peran guru yang berpengaruh, pemahaman guru tentang korupsi, dan peran orang tua sebagai pendidik pertama dalam membentuk sikap dan karakter siswa. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi dan lingkungan sosial yang kurang mendukung.

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan serius yang telah berkembang secara kompleks dan meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hampir seluruh institusi pemerintahan di Indonesia tidak luput dari persoalan ini, menjadikannya sebagai fenomena eksekutif yang sulit diberantas. Korupsi sendiri dipahami sebagai penyimpangan dari tugas resmi seorang pejabat negara demi keuntungan pribadi, baik berupa uang, status, fasilitas, maupun kepentingan kelompok tertentu, dengan cara melanggar hukum yang berlaku (Cahyani, 2020).

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2022 tercatat 579 kasus korupsi yang ditindak, meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Jumlah tersangka juga naik 19,01%, dari 1.173 menjadi 1.396 orang (Kompas.com, 2023). Data ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek moral dan integritas, sangat mendesak. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dunia pendidikan memiliki

peran strategis dalam membentuk karakter antikorupsi sejak dini. Sekolah merupakan tempat utama dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Pendidikan antikorupsi bertujuan membangun kesadaran serta sikap menolak segala bentuk praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat (Anienda et al., 2019). Dalam konteks ini, pendidikan menjadi langkah preventif yang efektif untuk menanggulangi korupsi jangka panjang.

Pendidikan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, agama, dan budaya lokal. Keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada kompetensi dan keteladanan guru. Guru tidak hanya dituntut menyampaikan materi, tetapi juga harus menjadi teladan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan nyata (Rina Febriana, 2021). Nilai-nilai penting seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keadilan harus diajarkan dan dicontohkan kepada siswa (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018).

penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi masih belum optimal. Misalnya, Siregar dan Chastanti (2022) menemukan bahwa banyak guru belum mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran, dan belum mampu menjadi panutan. Namun, hasil positif ditemukan dalam penelitian Mahmudah (2022) yang mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal menunjukkan hasil baik. Contoh sukses lainnya ditunjukkan oleh sekolah-sekolah seperti SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta dan SMP Negeri 10 Purwakarta yang menerima penghargaan dari KPK karena berhasil membentuk budaya antikorupsi di sekolah (Medcom.id, 2022).

SMP PGRI 6 Malang adalah sekolah swasta yang memiliki visi menanamkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk karakter melalui mata pelajaran PPKn. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru PPKn, Ibu Lusi Rahmawati, implementasi pendidikan antikorupsi belum berjalan maksimal. Meskipun ada upaya mengurangi keterlambatan dan menegur siswa yang menyontek, masih banyak ditemukan perilaku tidak jujur, seperti menyalin tugas dan berbohong saat ujian. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman siswa terhadap esensi perilaku koruptif.

Penyebab utama kurangnya efektivitas pendidikan antikorupsi adalah minimnya penekanan dalam kurikulum serta kurangnya pembahasan di lingkungan sekolah dan rumah. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu diterapkan secara eksplisit dan menyeluruh, tidak hanya melalui mata pelajaran PPKn, tetapi juga terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Guru sebagai agen perubahan harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari.

Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pendidikan antikorupsi di SMP PGRI 6 Malang melalui pembelajaran PPKn. Harapannya, siswa mampu mengenali bentuk-bentuk korupsi di lingkungan sekolah dan menghindari sikap permisif terhadap perilaku seperti menyontek dan ketidaktelitian. Dengan membentuk karakter yang jujur dan bertanggung jawab, sekolah dapat melahirkan generasi berintegritas tinggi yang siap menjadi agen perubahan dalam pemberantasan korupsi di masa depan

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi,

wawancara, dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk implementasi nilai Antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP PGRI 6 Malang

a) Nilai kejujuran

Nilai kejujuran di SMP PGRI 6 Malang telah diterapkan dengan baik melalui pembiasaan sejak kelas VII hingga IX. Siswa diajarkan untuk menghindari kecurangan, seperti menyontek, dan lebih mengutamakan berpikir mandiri. Di kantin dan koperasi, mereka dibiasakan membayar barang yang dibeli. Namun, masih ada siswa yang terkadang tidak jujur, seperti menyontek atau tidak membayar sesuai dengan yang diambil. Pembiasaan ini bertujuan membentuk karakter jujur pada peserta didik. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Drs. Riono, Kepala Sekolah sekaligus guru PPKn kelas IX mengungkapkan bahwa :

“Di mata pelajaran PPKn, pembahasan tentang antikorupsi memang sangat penting, namun bahan-bahan yang ada tidak selalu mencerminkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, guru harus pintar dalam memilih materi dan pembiasaan untuk menanamkan nilai kejujuran. Salah satunya adalah dengan memberikan tugas yang harus dikerjakan sendiri oleh siswa, tanpa menyontek jawaban teman”

b) Kepedulian

Pada temuan ini, nilai kepedulian menunjukkan bahwa penerapan nilai kepedulian di SMP PGRI 6 Malang telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik saling memperhatikan satu sama lain, yang merupakan hasil dari pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Nilai kepedulian sosial diajarkan kepada peserta didik melalui kegiatan rutin yang diadakan. Sekolah mengedepankan kegiatan seperti berinfak dan bersedekah, tidak hanya untuk

mengajarkan siswa tentang pentingnya membantu sesama, tetapi juga untuk memperkenalkan mereka pada konsep berbagi sejak dini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti Aisyah, S.pd guru PPKn kelas VII mengungkapkan bahwa :

“Kepedulian di kelas dapat terlihat, misalnya, melalui pengumpulan dana infaq, shodaqoh, atau amal yang mencapai puluhan ribu rupiah, seperti tiga puluh ribu rupiah. Dana tersebut kemudian diserahkan kembali kepada bendahara. Ini merupakan bentuk penerapan pembelajaran yang mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghindari korupsi. Melalui cara ini, mereka belajar untuk memberikan hasil kerja keras mereka untuk tujuan yang baik, seperti mengumpulkan dana infaq dan amal, yang juga menjadi salah satu penerapan materi PPKn, terutama terkait dengan pembelajaran tentang korupsi.”

c) Kemandirian

Pada temuan ini, nilai kemandirian tercermin dalam sikap peserta didik SMP PGRI 6 Malang saat mengerjakan soal ujian atau tugas yang sulit dipahami. Meskipun menghadapi kesulitan, mereka memilih untuk menggunakan logika dan berusaha menyelesaikan tugas tersebut sendiri, tanpa menyontek atau meminta bantuan dari teman di sebelahnya. Namun demikian, masih ada beberapa peserta didik yang terkadang menyalin jawaban teman mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Usamah Abdul Aziz, S.pd. selaku Waka Kesiswaan mengungkapkan bahwa.

“Salah satunya, pembiasaan tugas mandiri memang harus dikerjakan sendiri, terutama ketika harus dibawa pulang. Jika memang bisa diselesaikan di sekolah, mengapa tidak? Kita harus mendorong kebiasaan anak untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun mungkin ada satu atau dua siswa yang masih menyontek jawaban teman, kita harus tetap membiasakan mereka untuk berusaha memecahkan masalah tersebut dengan kemampuan mereka sendiri.”

d) Kedisiplinan

Pada temuan ini, nilai kedisiplinan menunjukkan bahwa penerapan nilai kedisiplinan di SMP PGRI 6 Malang sudah dilakukan dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Peserta didik diharapkan sudah berada di kelas tepat waktu, namun dalam praktiknya masih ada beberapa yang datang terlambat. Keterlambatan ini menghambat proses pembelajaran yang seharusnya berjalan lancar. Jika mereka tidak menepati waktu, saya akan memberikan sanksi sebagai konsekuensi agar mereka dapat lebih disiplin di masa depan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lusiana Rahmawati, S.pd guru PPKn kelas VI. mengungkapkan bahwa :

“Peserta didik di SMP PGRI 6 Malang sudah menerapkan sikap disiplin ini, meskipun pelajaran PPKn dimulai pada pukul 07.40 dan istirahat pada pukul 09.40. Peserta didik diharapkan sudah berada di kelas tepat waktu, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Keterlambatan ini menghambat proses pengajaran yang seharusnya berjalan dengan baik. Jika mereka tidak menepati waktu, saya akan memberikan sanksi sebagai konsekuensi agar mereka lebih disiplin ke depannya.” (Hasil wawancara /selasa 3 september 2024)

e) Tanggung jawab

Pada temuan ini, nilai tanggung jawab menunjukkan bahwa penerapan nilai tanggung jawab di SMP PGRI 6 Malang sudah dilakukan dengan cukup baik. Nilai tanggung jawab peserta didik tercermin dalam pembelajaran di kelas, di mana mereka mengerjakan tugas dengan serius dan menghindari kecurangan seperti menyontek dari teman. Namun, masih terdapat kendala, karena beberapa peserta didik masih menyontek tugas dari temannya dan tidak serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rodhiah, S.pd. selaku guru bimbingan konseling mengungkapkan bahwa :

“Tanggung jawab berarti memahami dan mematuhi aturan. Sebagai siswa yang memahami aturan, peserta didik

harus menerima hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Setiap siswa berhak mendapatkan pelayanan terbaik di sekolah, namun juga wajib menjalankan kewajiban, seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Namun, kenyataannya masih ada beberapa siswa yang belum menjalankan kewajibannya, seperti tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru."

f) Kerja keras

Pada temuan ini, nilai kerja keras menunjukkan bahwa penerapan nilai kerja keras di SMP PGRI 6 Malang telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari peserta didik yang berusaha sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tanpa menyontek dari teman-temannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa peserta didik yang kurang bersemangat dan menyalin tugas dari teman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Riono, selaku Kepala Sekolah sekaligus guru PPKn kelas IX, mengungkapkan bahwa :

"Penerapan nilai kerja keras dapat terlihat melalui pemberian tugas yang harus dikerjakan dengan usaha sendiri, tanpa menyontek jawaban teman-teman. Hal ini bertujuan agar mereka terbiasa berpikir secara mandiri. Penerapannya dapat dilihat dari hasil karya mereka dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan, di mana mereka tidak hanya menyalin jawaban dari orang lain, tetapi mampu memberikan pemikiran atau solusi yang asli. Namun, masih ada beberapa siswa yang menyontek tugas dari temannya tanpa terlebih dahulu berusaha mengerjakannya sendiri."

g) Kesederhanaan

Pada temuan ini, nilai kesederhanaan di SMP PGRI 6 Malang telah diterapkan dengan baik. Nilai kesederhanaan peserta didik tercermin dalam kebiasaan mereka mengenakan seragam sesuai dengan peraturan sekolah tanpa menambahkan aksesoris lain. Peserta didik wanita pun mengikuti aturan yang berlaku dan tidak menambahkan aksesoris yang tidak sesuai. Selain itu, peserta didik juga

dibiasakan untuk hidup sederhana dengan memberikan infak dan sodakoh kepada yang membutuhkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti Aisyah, S.pd guru PPKn kelas VII mengungkapkan bahwa :

"Kesederhanaan ini dapat dilihat dari kebiasaan peserta didik yang mengenakan seragam sesuai dengan peraturan sekolah tanpa menambahkan aksesoris lain. Untuk peserta didik wanita, mereka juga mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu, sekolah membiasakan peserta didik untuk saling membantu sesama dengan cara memberikan infak dan sedekah melalui uang jajannya."

h) Keberanian

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa nilai keberanian terlihat pada peserta didik di SMP PGRI 6 Malang. Keberanian mereka tercermin ketika siswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal, menunjukkan rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta berani memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru. Sikap ini mencerminkan rasa percaya diri dan tanggung jawab sebagai peserta didik. Namun, masih ada beberapa peserta didik yang terkadang membangkang ketika diminta maju ke depan kelas dan menyontek tugas dari teman-temannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Riono, selaku Kepala Sekolah sekaligus guru PPKn kelas IX, mengungkapkan bahwa :

"Saya percaya bahwa keberanian siswa di sekolah sangat penting, baik dalam berani maju di depan kelas maupun dalam menghadapi tantangan akademis. Keberanian untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru merupakan bagian dari pengembangan diri, karena siswa belajar untuk mengatasi rasa takut atau keraguan mereka. Namun, saya juga menyadari bahwa tidak semua siswa mampu atau mau untuk menghadapinya dengan cara yang benar. Beberapa di antaranya mungkin merasa cemas atau kurang percaya diri, yang membuat mereka lebih memilih untuk membangkang atau menyontek."

i) Keadilan

Pada temuan ini, nilai keadilan menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan di SMP PGRI 6 Malang sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dalam sikap peserta didik yang melaksanakan jadwal piket kelas secara merata, yang diatur oleh wali kelas, serta saling menghormati satu sama lain. Selain itu, dalam kegiatan diskusi dan pembagian tugas dalam kelompok, siswa mengerjakan tugas secara adil dan merata. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rodhiah, S.pd. selaku guru bimbingan konseling mengungkapkan bahwa :

“Keadilan di sekolah berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa diskriminasi. Saling menghargai antar siswa tercipta ketika mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, pembagian jadwal piket yang dilakukan oleh setiap wali kelas, serta pembagian tugas dalam kelompok. Sebagai guru, kita harus adil dalam membagikan tugas agar setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi.”

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Antikorupsi Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan di SMP PGRI 6 Malang

a) Faktor pendukung

1) Guru

Pada temuan ini faktor pendukung dalam implementasi nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn di SMP PGRI 6 Malang adalah peran guru yang memiliki kesadaran tinggi untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Guru tidak hanya menyelipkan materi terkait nilai antikorupsi dalam pembelajaran di kelas, tetapi juga memberi teladan melalui sikapnya. Sikap guru yang taat pada aturan sekolah menjadi contoh yang diikuti oleh peserta didik. Contoh konkret dari hal ini adalah guru yang disiplin dengan datang tepat waktu, bersikap tegas dalam ujian dengan menekankan pentingnya kejujuran, bersikap adil

dengan tidak membedakan peserta didik, memberikan nilai sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik, serta melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Usamah Abdul Aziz, S.pd. selaku Waka Kesiswaan mengungkapkan bahwa:

“Faktor pertama yang mendukung adalah, sebagai guru, kami diharapkan tidak hanya fokus pada materi pembelajaran, tetapi juga senantiasa menyelipkan pembahasan tentang akhlak, adab, sopan santun, dan karakter. Hal ini karena karakter yang baik sangat penting bagi siswa. Meskipun mereka memiliki kondisi yang baik, jika karakter mereka buruk, hal itu bisa menjadi benih-benih potensi korupsi di masa depan. Sebaliknya, jika sejak dini, seperti di tingkat SD atau SMP, mereka sudah dibentuk dengan karakter yang baik, mereka akan mampu menerapkan nilai-nilai antikorupsi di masa mendatang.”

2) Sosialisasi mengenai Pendidikan antikorupsi

Pada temuan ini Faktor pendukung implementasi nilai antikorupsi melalui pembelajaran PPKn di SMP PGRI 6 Malang adalah sosialisasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai pendidikan antikorupsi. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengundang pemateri dari luar dan melibatkan guru PPKn yang memahami pendidikan antikorupsi untuk menyampaikan materi terkait kepada siswa. Selain itu, guru juga memberikan pembelajaran tentang pendidikan antikorupsi di kelas sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rodhiah, S.Pd., selaku Guru Bimbingan Konseling mengungkapkan bahwa :

“Faktor yang mendukung, misalnya melalui sosialisasi dengan mengundang pemateri dari luar, dapat memberikan penekanan kepada siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. Dengan demikian, siswa memiliki pemahaman yang jelas bahwa

melakukan korupsi dapat berdampak serius. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui materi eksternal, guru PPKn, dan juga pembelajaran di kelas, di mana materi terkait korupsi dapat diselipkan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada siswa."

3) kegiatan ekstrakurikuler

Pada temuan Faktor pendukung dalam implementasi nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn di SMP PGRI 6 Malang adalah peran kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai minat dan bakat, sekaligus mengasah potensi sosial seperti kerja sama dan tanggung jawab. Melalui berbagai aktivitas, keberanian siswa terlatih dan mereka memperoleh pengalaman nyata yang menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai bagian penting dari sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti Aisyah, S.pd guru PPKn kelas VII mengungkapkan bahwa :

"Selain kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan ekstrakurikuler juga membantu mengembangkan potensi sosial peserta didik, seperti bekerja sama dalam kelompok dan menunjukkan rasa tanggung jawab."

b) Faktor penghambat

1) Orang tua

Pada temuan ini, faktor penghambat dalam implementasi nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn di SMP PGRI 6 Malang adalah lingkungan keluarga. Salah satunya, sikap peserta didik yang sering terlambat atau membolos dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua yang cenderung acuh tak acuh atau masa bodoh. Ketidakpedulian orang tua terhadap perilaku anak dapat

berkontribusi pada kurangnya disiplin dan tanggung jawab dalam diri anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Riono, selaku Kepala Sekolah sekaligus guru PPKn kelas IX, mengungkapkan bahwa :

"melalui pembelajaran PPKn memang antikorupsi itu gak berjalan dari eeeee bapak/ ibu guru di sekolah tetap ada kaitan Pendidikan yang terjadi di rumah tangga mereka kalau keluarganya sudah cuek bebek bisanya saja gak tau menau yang penting ke sekolah tu anaknya dititipkan atau istilah jawanya pasrah bongkokan dititipkan sepatah bapa ibu guru ya ini susah. Itu faktor penghambat sehingga orang tua harus ikut terlibat butuh kerjasama dengan orang tua dengan masyarakat bahkan dengan keluarga mereka di rumah ini yang harus kita jalin Pendidikan akan berhasil tiga poin ini masyarakat, sekolah, dan orang tua ini berjalan dengan sinergi saya yakin Pendidikan apapun bisa di laksanakan walaupun hasilnya tidak seperti semudah membalik telapak tangan bergitu enggeh"

2) Kurangnya kesadaran peserta didik

Faktor penghambat penerapan nilai antikorupsi di SMP PGRI 6 Malang adalah kurangnya kesadaran siswa. Masih ada yang datang terlambat, menyontek, dan melanggar aturan. Walau sudah diberi pembinaan seperti lewat upacara, beberapa siswa tetap melakukan pelanggaran. Jika peringatan tidak dihiraukan, guru akan memberi sanksi tegas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Usamah Abdul Aziz, S.pd. selaku Waka Kesiswaan mengungkapkan bahwa :

3) Kurangnya Kemampuan Guru dalam Menyampaikan Nilai-nilai Antikorupsi

Pada temuan ini, faktor penghambat dalam implementasi nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn di SMP PGRI 6 Malang adalah Guru terkadang mengalami kesulitan dalam mengemas atau menyisipkan materi yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi dalam

pembelajaran. Topik Pendidikan antikorupsi memang tidak terdapat dalam kurikulum, sehingga guru perlu memiliki kejelian dan kemampuan untuk menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dengan tepat ke dalam tema pembelajaran yang akan disampaikan di kelas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Usamah Abdul Aziz, S.pd. selaku Waka Kesiswaan mengungkapkan bahwa :

“Faktor penghambat implementasi pendidikan antikorupsi di SMP PGRI 6 Malang meliputi tiga hal utama. Pertama, keterbatasan waktu pembelajaran membuat guru lebih fokus pada materi inti sehingga nilai-nilai karakter seperti kejujuran dan tanggung jawab kurang tersampaikan. Kedua, masih banyak siswa yang melanggar aturan, seperti menyontek dan tidak jujur. Ketiga, sikap guru yang kurang peduli terhadap pendidikan karakter juga menjadi kendala. Jika semua pihak berkomitmen, tantangan ini dapat diatasi bersama”

B. Pembahasan

1. Bentuk Implementasi Nilai Antikorupsi Melalui Pembelajaran PPKn di SMP PGRI 6 Malang

a) Kejujuran

Nilai kejujuran diterapkan melalui pembiasaan sejak kelas VII, seperti tidak menyontek dan membayar belanjaan di kantin. Meskipun sudah berjalan cukup baik, masih ada siswa yang menyontek atau tidak membayar sesuai. Menurut Maulidiyah (2019), kejujuran harus dipupuk sejak dini agar menjadi pondasi antikorupsi.

b) Kepedulian

Siswa dibiasakan peduli lewat kegiatan infak dan sedekah. Mereka saling memperhatikan sesama teman. Widiyani (2022) menyatakan kepedulian dapat mencegah budaya korupsi.

c) Kemandirian

Siswa didorong menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa menyontek. Meski masih ada yang bergantung pada teman, sebagian besar berusaha sendiri. Senjaya dkk (2020) menegaskan bahwa

kemandirian penting untuk mencegah ketergantungan dan perilaku korupsi.

d) Kedisiplinan

Pelajaran dimulai pukul 07.40, namun masih ada siswa yang datang terlambat. Guru memberi sanksi agar mereka belajar disiplin. Syaparuddin & Elihami (2020) menyatakan disiplin mencegah pelanggaran hukum dan korupsi.

e) Tanggung jawab

Sebagian besar siswa mengerjakan tugas dengan serius, namun masih ada yang menyalin. Zainal Mutaqin dkk. (2021) menyebutkan bahwa rasa tanggung jawab harus ditanamkan untuk mencegah korupsi.

f) Kerja keras

Siswa berusaha mengerjakan tugas tepat waktu tanpa menyontek, meskipun ada yang masih malas. Sutriyanti (2021) menjelaskan kerja keras dan pantang menyerah adalah modal penting mencegah tindakan korupsi.

g) Kesederhanaan

Siswa mengenakan seragam sesuai aturan dan tidak berlebihan dalam bergaya. Mereka juga diajarkan berbagi melalui infak. Menurut Yenik Pujowati (2021), kesederhanaan sebaiknya ditanamkan sejak dini.

h) Keberanian

Siswa berani maju ke depan kelas dan menjawab pertanyaan guru. Namun, masih ada yang enggan tampil. Nuraida (2021) menyatakan keberanian dalam menyuarakan kebenaran adalah bagian dari nilai antikorupsi.

i) Keadilan

Siswa melaksanakan piket dan tugas kelompok secara merata. Mereka juga saling menghormati. Febriansyah (2018) menyatakan keadilan mencegah sikap pilih kasih dan praktik korupsi

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi antikorupsi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP PGRI 6 Malang

a) faktor pendukung

1) Guru

Guru menjadi faktor utama dalam menanamkan nilai antikorupsi. Mereka tidak hanya menyampaikan materi di kelas, tetapi juga memberi contoh lewat sikap disiplin, adil, dan

jujur. Keteladanan ini membuat siswa meniru perilaku positif guru. Menurut Rachman (2019), guru adalah agen perubahan yang dapat menanamkan nilai antikorupsi melalui keteladanan.

2) Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi

Sekolah rutin mengadakan sosialisasi melalui guru atau pemateri luar yang menyampaikan materi antikorupsi. Triyanto (2019) menyatakan bahwa pengajaran aktif nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab mendukung pemahaman siswa terhadap antikorupsi.

3) Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler membantu siswa mengembangkan tanggung jawab, kerja sama, dan keberanian, yang mendukung pembentukan karakter antikorupsi. Widodo (2021) menyebut kegiatan ekstrakurikuler mampu mengasah keterampilan sosial dan emosional siswa dalam membentuk integritas.

b) Faktor penghambat

1) Orang tua

Kurangnya perhatian orang tua berdampak negatif terhadap perilaku siswa. Ketidakterlibatan orang tua menyebabkan siswa kurang disiplin dan bertanggung jawab. Suryana (2020) menyebutkan bahwa orang tua sebagai pendidik pertama sangat berpengaruh terhadap sikap anak. Temuan di sekolah menunjukkan beberapa siswa terlambat atau membolos akibat kurangnya pengawasan dari orang tua.

2) Kurangnya kesadaran peserta didik

Beberapa siswa belum menyadari pentingnya nilai antikorupsi, yang terlihat dari perilaku menyontek, tidak disiplin, dan melanggar aturan sekolah. Suryani (2021) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran terhadap nilai kejujuran dan integritas menghambat penerapan pendidikan antikorupsi. Penelitian menunjukkan masih ada siswa yang melakukan pelanggaran meski sekolah telah melakukan pembinaan, seperti melalui upacara atau pemberian sanksi.

3) Kurangnya Kemampuan Guru dalam Menyampaikan Nilai Antikorupsi

Materi antikorupsi tidak secara eksplisit tercantum dalam kurikulum PPKn, sehingga guru perlu kreatif dalam menyisipkannya ke dalam pembelajaran. Suryani (2020) menyatakan bahwa guru harus memiliki keterampilan menyisipkan nilai antikorupsi ke berbagai materi pembelajaran. Temuan menunjukkan beberapa guru kesulitan mengemas materi antikorupsi karena tidak adanya panduan khusus dalam kurikulum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian, implementasi nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran PPKn di SMP PGRI 6 Malang mencakup kelas VII, VIII, dan IX, dengan menekankan sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku peserta didik, seperti menghindari kecurangan, menyelesaikan tugas tanpa menyontek, mematuhi aturan sekolah, dan berani mengerjakan soal.

Namun, masih ada peserta didik yang belum sepenuhnya memahami nilai-nilai tersebut, seperti terlambat atau menyontek. Faktor pendukung implementasi nilai antikorupsi adalah keterlibatan guru sebagai teladan, sosialisasi pendidikan antikorupsi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi kurangnya keterlibatan orang tua dalam membentuk karakter anak, rendahnya kesadaran peserta didik, dan kurangnya pemahaman guru dalam menyampaikan materi antikorupsi.

B. Saran

1. Kepada pihak sekolah

SMP PGRI Malang diharapkan menjadi fasilitator yang aktif dalam mendukung guru dan siswa menerapkan anti korupsi melalui PPKn

2. Kepada guru PPKn di sekolah

Guru PPKn diharapkan tetap konsisten mengajarkan nilai antikorupsi dan terus meningkatkan pengetahuan agar pembelajaran lebih optimal

3. Kepada Siswa SMP PGRI 6 Malang
Siswa diharapkan lebih serius mengikuti pembelajaran antikorupsi dan menyadari bahwa korupsi adalah tindakan tercela.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan meneliti penerapan nilai antikorupsi di sekolah lain dengan konteks berbeda atau secara komparatif, serta melibatkan peran orang tua

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, R. A., Soesanto, E., Rusdiyanto, R., & Listiano, A. (2024). PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEJAK USIA DINI. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 4(1), 132-142.
- DJOH, Arcella JMU; HIBUR, Yohana F. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata Pelajaran Ppkn Bagi Siswa SMA Negeri Waingapu. *Ganesha Civic Education Journal*, 2019, 1.2: 66-70.
- Febriansyah, Ferry Irawan, and Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Unmuh Ponorogo Press, 2020.
- Hidayah, N. P., & Esfandiari, F. (2022). Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 77-88.
- IDAWATI, Lili; SYAFE'I, Imam; AKHMANSYAH, Muhammad. Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2023, 5.1: 258-279.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *REFLEKSI EDUKATIKA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 9, No.1.
- Kristiono, Natal. 2018. Model Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Sebagai Pembentukan Karakter Siswa (dalam Pendidikan karakter, Masalah dan Solusinya). Semarang: Jurusan PKN Unne
- Kurniawan, Moh, and Rose Fitria Lutfiana. "Strategi Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 8.1 (2021): 32-39.
- Mahmudah, S. (2022). Penerapan kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 343-354.
- RADE, Stefanus Don; WOHON, Ernesta Uba; LOBO, Ferdinandus. Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2023, 5.2: 5209-5215.
- Senjaya, P., Kotamena, F., & Andika, C. (2020). Studi Kasus: Pengaruh Pendidikan Karakter Dan Tata Nilai Terhadap Kecerdasan Emosi Dan Kemandirian Siswa Sekolah Dasar Di Serpong.
- Siregar, Ahmad Ansyari, and Ika Chastanti. "Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 9.1 (2022): 13-22.
- Sugiono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: alfabeta
- Sutriyanti, N. K. (T.T.). (2021) Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Melalui Peran Orang Tua Dalam Keluarga.
- Syaparuddin, Syaparuddin, Elihami Elihami, and A. Latar Belakang. "Peningkatan Kecerdasan Emosional (EQ) Dan Kecerdasan Spiritual (SQ) Siswa Sekolah Dasar SD Negeri 4 Bilokka Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Diri Dalam Proses Pembelajaran PKn." *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1.1 (2020): 11-29.
- TANJUNG, Rahman; NASEM, Nasem; SAFARIDAWATY, Selvy. Webinar Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Bagi Orang Tua dan Guru Anak Usia Dini. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023, 2.2: 232-239.
- Taqiuddin, H. U. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa (Studi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat). *Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities*, 1(1), 1-13.

- TIM Penulis Pendidikan Antikupsi Untuk Zainal Mutaqin, M., Ahmad, N., & Suhartini, A.
Perguruan Tinggi 2018 (2021). Tanggung Jawab Pendidik Dan
Implikasinya Terhadap Lingkungan Pendidikan Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmullmu Keislaman*, 11(2), 143-162.
https://jurnal.Ucy.Ac.Id/Index.Php/Agama_Islam
- Widiyani, U. (2022). Peran Guru Ips Dalam Menanamkan Sikap Empati Dan Kepedulian Sosial Kelas Xi Sman 1 Slahung Ponorogo.
- Yenik Pujowati.2021. Dinamika Kebijakan Pembelajaran Daring di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Pamator*. Volume 14 No 2, Oktober 2021, Hlm 158-164